

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/Permentan/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi tahun anggaran 2018, telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

b. bahwa dalam pelaksanaan kegiatan terjadi perubahan alokasi sekaligus untuk optimalisasi penyediaan pupuk bersubsidi, perlu dilakukan perubahan alokasi pupuk bersubsidi Tahun Anggaran 2018;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
6. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan;

15. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
16. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
17. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasar;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK. 05/2010 tentang Tatacara Pencairan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara Bagian Atas Beban Anggaran Bendahara Umum Negara Pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
20. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian;
21. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16/M-IND/PER/3/2013 tentang Pewarnaan Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 480);
22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);
23. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17/M-IND/PER/3/2016

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek Untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 399);

24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Petani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2038);
25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018.

PASAL I

Mengubah Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 47/Permentan/SR.310/12/2017 tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2018, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Alokasi Pupuk Bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan pupuk dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan penyerapan Pupuk Bersubsidi tahun sebelumnya serta alokasi anggaran subsidi pupuk yang tersedia.

(2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, provinsi, dan sebaran bulanan seperti tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(3) Perubahan Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri, dalam bentuk Keputusan Menteri.

PASAL II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,

AMRAN SULAIMAN

Salinan Peraturan Menteri ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Perindustrian;
5. Menteri Perdagangan;
6. Menteri Kelautan dan Perikanan;
7. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
9. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
10. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
11. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia (Persero).

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018
MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN PROVINSI

NO.	PROPINSI	JENIS PUPUK (Ton)				
		UREA	SP-36	ZA	NPK	ORGANIK
1	ACEH	80,687	24,320	14,670	54,000	8,950
2	SUMATERA UTARA	168,732	55,330	50,090	143,540	19,700
3	SUMATERA BARAT	66,943	32,030	15,700	72,240	9,650
4	J A M B I	31,564	19,960	8,760	59,205	6,200
5	R I A U	43,814	16,260	12,620	53,460	6,375
6	BENGKULU	21,820	7,720	5,220	27,040	4,480
7	SUMATERA SELATAN	149,356	43,320	3,160	106,814	5,303
8	BANGKA BELITUNG	26,193	4,920	3,090	21,680	7,017
9	LAMPUNG	273,415	45,420	14,255	172,360	16,000
10	KEP. RIAU	90	20	15	150	75
11	DKI. JAKARTA	40	30	-	30	9
12	BANTEN	65,390	20,670	1,250	31,090	5,951
13	JAWA BARAT	544,532	150,810	66,000	302,294	51,141
14	D.I. YOGYAKARTA	39,000	3,650	9,000	26,080	2,967
15	JAWA TENGAH	768,603	146,262	193,000	417,740	170,222
16	JAWA TIMUR	1,124,375	155,275	477,600	633,530	361,881
17	B A L I	37,030	1,390	3,750	23,950	3,852
18	KALIMANTAN BARAT	39,000	11,910	3,730	95,377	8,000
19	KALIMANTAN TENGAH	17,684	4,630	1,350	35,553	2,500
20	KALIMANTAN SELATAN	39,539	7,550	1,270	45,685	4,200
21	KALIMANTAN TIMUR	19,035	4,740	2,365	35,680	1,800
22	KALIMANTAN UTARA	1,525	130	65	4,142	110
23	SULAWESI UTARA	22,467	4,420	340	13,230	750
24	GORONTALO	37,736	1,730	730	30,830	1,200
25	SULAWESI TENGAH	37,292	2,460	7,340	29,200	2,200
26	SULAWESI TENGGARA	23,674	7,630	4,580	19,870	4,500
27	SULAWESI SELATAN	317,414	49,370	69,700	145,900	17,500
28	SULAWESI BARAT	30,640	2,460	9,380	24,760	1,400
29	NUSA TENGGARA BARAT	179,815	19,350	19,180	54,850	7,500
30	NUSA TENGGARA TIMUR	28,615	2,950	630	18,120	1,690
31	MALUKU	3,416	295	230	2,820	660
32	PAPUA	8,003	2,698	680	8,940	1,997
33	MALUKU UTARA	1,301	140	180	1,990	60
34	PAPUA BARAT	1,260	150	70	1,850	160
JUMLAH		4,250,000	850,000	1,000,000	2,714,000	736,000

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018 MENURUT JENIS PUPUK DAN SEBARAN BULAN

(Ton)

JENIS PUPUK	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
UREA	4,250,000	386,309	319,664	343,778	357,550	347,048	256,250	282,701	265,576	298,622	330,221	454,308	607,973
SP-36	850,000	75,370	94,673	100,640	87,476	75,343	41,738	63,673	48,479	61,922	68,515	66,420	65,751
ZA	1,000,000	93,057	88,740	99,262	90,356	78,940	51,573	81,423	69,994	78,812	88,684	91,013	88,146
NPK	2,714,000	185,104	232,844	259,597	244,461	226,370	147,863	206,359	172,341	199,907	215,107	314,223	309,824
ORGANIK	736,000	50,019	62,673	73,922	64,022	57,883	36,348	64,865	52,661	59,476	72,101	74,066	67,964
JUMLAH PUPUK	9,550,000	789,859	798,594	877,199	843,865	785,584	533,772	699,021	609,051	698,739	774,628	1,000,030	1,139,658

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Nopember 2018

MENTERI PERTANIAN,

AMRAN SULAIMAN

LAMPIRAN II.1
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	80,687	7,058	9,454	5,467	5,674	7,502	5,702	6,556	4,689	4,477	6,644	7,470	9,994
2	SUMATERA UTARA	168,732	8,795	15,476	16,478	15,615	14,240	7,946	12,708	12,772	15,839	17,056	13,602	18,205
3	SUMATERA BARAT	66,943	5,538	5,240	5,554	6,957	5,191	2,989	5,431	4,893	6,098	5,415	5,832	7,805
4	J A M B I	31,564	1,967	3,257	1,960	2,502	2,108	1,202	2,445	1,737	2,826	2,627	3,821	5,112
5	R I A U	43,814	2,551	3,573	3,135	3,453	3,364	1,347	3,863	3,422	4,167	2,934	5,135	6,870
6	BENGKULU	21,820	1,792	2,420	1,824	2,025	1,899	1,108	1,142	1,744	1,580	2,023	1,823	2,440
7	SUMATERA SELATAN	149,356	12,087	13,497	12,646	13,019	12,692	9,297	9,732	7,069	9,203	15,069	14,988	20,057
8	BANGKA BELITUNG	26,193	1,201	2,134	2,382	1,911	2,017	1,343	1,970	2,228	1,842	3,308	2,505	3,352
9	LAMPUNG	273,415	31,409	26,485	24,072	21,836	24,641	17,825	17,655	12,891	18,811	21,404	24,114	32,272
10	KEP. RIAU	90	-	-	-	9	-	-	14	2	26	-	17	22
11	DKI. JAKARTA	40	-	-	-	-	-	-	6	4	-	-	13	17
12	BANTEN	65,390	5,473	4,931	5,056	6,754	6,042	3,672	3,536	2,702	2,829	2,832	9,222	12,341
13	JAWA BARAT	544,532	53,213	32,397	40,531	52,262	53,475	34,471	35,171	30,363	31,351	24,975	66,854	89,469
14	D.I. YOGYAKARTA	39,000	3,018	1,924	2,480	2,767	2,285	1,316	2,358	2,969	5,489	3,674	4,585	6,135
15	JAWA TENGAH	768,603	61,258	62,769	73,986	66,183	57,586	39,355	49,300	43,055	55,187	62,677	84,356	112,891
16	JAWA TIMUR	1,124,375	80,329	63,184	86,934	88,856	77,406	65,912	79,438	91,123	87,877	102,522	128,640	172,154
17	B A L I	37,030	4,374	3,415	2,393	2,132	2,743	2,711	2,772	2,881	3,190	2,429	3,417	4,573
18	KALIMANTAN BARAT	39,000	2,653	3,447	3,179	2,841	3,428	2,112	2,981	2,650	2,598	3,188	4,244	5,679
19	KALIMANTAN TENGAH	17,684	1,607	1,653	2,406	1,879	1,958	1,240	673	713	778	1,045	1,597	2,135
20	KALIMANTAN SELATAN	39,539	5,134	4,004	4,029	5,285	3,643	1,765	1,154	1,243	1,487	3,240	3,658	4,897
21	KALIMANTAN TIMUR	19,035	1,839	1,904	1,576	1,643	1,688	1,150	1,535	1,251	922	1,154	1,870	2,503
22	KALIMANTAN UTARA	1,525	31	179	124	168	119	28	47	7	124	59	273	366
23	SULAWESI UTARA	22,467	2,059	2,027	2,256	1,719	1,735	1,280	1,096	1,246	1,607	1,469	2,554	3,419
24	GORONTALO	37,736	2,260	3,656	3,275	3,255	2,187	1,739	1,751	2,151	3,035	3,218	4,794	6,415
25	SULAWESI TENGAH	37,292	5,211	3,634	2,403	2,357	3,336	3,344	3,597	1,721	3,149	1,468	3,025	4,047
26	SULAWESI TENGGARA	23,674	2,802	1,946	2,225	1,439	1,619	1,759	1,759	1,961	2,127	1,286	2,032	2,719
27	SULAWESI SELATAN	317,414	44,235	22,688	21,459	26,778	36,083	28,615	19,156	15,297	18,040	19,555	28,016	37,492
28	SULAWESI BARAT	30,640	3,105	2,106	2,213	2,524	3,706	2,806	1,179	1,583	2,431	2,039	2,972	3,976
29	NUSA TENGGARA BARAT	179,815	28,780	16,053	10,491	13,243	12,415	12,591	10,629	8,644	9,090	13,956	18,785	25,138
30	NUSA TENGGARA TIMUR	28,615	5,306	4,300	2,201	1,406	891	1,090	1,889	1,773	1,654	1,995	2,613	3,497
31	MALUKU	3,416	494	432	213	180	252	34	462	203	188	177	334	447
32	PAPUA	8,003	700	1,186	672	669	698	436	511	450	538	492	706	945
33	MALUKU UTARA	1,301	-	112	96	173	37	14	15	50	44	152	260	348
34	PAPUA BARAT	1,260	30	181	62	36	62	51	170	89	18	139	181	241
	JUMLAH PROPINSI	4,250,000	386,309	319,664	343,778	357,550	347,048	256,250	282,701	265,576	298,622	330,221	454,308	607,973

LAMPIRAN II.2
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	24,320	1,822	3,691	2,415	2,269	2,702	1,436	1,947	1,376	1,225	1,826	1,815	1,796
2	SUMATERA UTARA	55,330	1,544	7,102	7,961	5,807	5,126	2,613	4,780	3,661	3,746	4,077	4,479	4,434
3	SUMATERA BARAT	32,030	1,409	5,104	4,917	3,152	2,227	959	2,025	1,718	2,726	3,540	2,137	2,116
4	J A M B I	19,960	1,428	2,864	2,888	1,927	1,421	930	1,568	1,222	1,807	1,145	1,387	1,373
5	R I A U	16,260	551	1,947	2,690	1,751	1,573	526	1,216	922	934	1,693	1,235	1,222
6	BENGKULU	7,720	133	1,461	1,056	829	827	305	458	189	438	502	765	757
7	SUMATERA SELATAN	43,320	1,249	5,549	2,927	5,003	5,248	2,128	3,657	3,322	3,819	5,190	2,627	2,601
8	BANGKA BELITUNG	4,920	162	632	587	620	405	304	475	226	198	466	425	420
9	LAMPUNG	45,420	3,703	6,584	5,683	3,717	4,812	1,904	3,701	2,346	2,933	3,232	3,420	3,385
10	KEP. RIAU	20	-	-	-	2	2	-	6	-	2	3	3	2
11	DKI. JAKARTA	30	-	-	5	5	-	-	10	-	-	-	5	5
12	BANTEN	20,670	2,579	1,837	2,542	2,613	1,560	1,183	1,489	889	1,205	1,514	1,638	1,621
13	JAWA BARAT	150,810	19,429	13,729	14,294	15,252	13,908	8,259	11,119	8,011	11,048	8,667	13,616	13,478
14	D.I. YOGYAKARTA	3,650	387	347	423	339	273	175	272	259	283	302	296	294
15	JAWA TENGAH	146,262	12,255	14,831	18,867	15,526	10,899	6,451	8,833	7,979	11,982	13,681	12,542	12,416
16	JAWA TIMUR	155,275	16,121	13,840	17,831	14,203	12,776	7,659	12,911	10,270	12,999	13,715	11,533	11,417
17	B A L I	1,390	137	92	135	189	59	64	126	65	265	65	97	96
18	KALIMANTAN BARAT	11,910	402	1,188	1,946	1,684	1,040	342	1,503	895	1,075	670	585	580
19	KALIMANTAN TENGAH	4,630	345	897	713	474	831	202	178	124	114	229	263	260
20	KALIMANTAN SELATAN	7,550	900	1,474	1,188	573	913	369	371	322	440	426	288	286
21	KALIMANTAN TIMUR	4,740	159	838	559	443	511	269	472	370	289	345	244	241
22	KALIMANTAN UTARA	130	-	5	12	-	5	-	13	1	-	23	36	35
23	SULAWESI UTARA	4,420	178	607	441	449	521	418	168	350	367	360	282	279
24	GORONTALO	1,730	93	233	171	143	67	118	115	55	180	200	178	177
25	SULAWESI TENGAH	2,460	122	472	419	289	308	126	236	166	189	20	57	56
26	SULAWESI TENGGARA	7,630	1,083	847	1,039	997	546	542	488	457	488	516	315	312
27	SULAWESI SELATAN	49,370	6,156	5,115	5,293	5,720	4,941	2,887	3,489	2,470	2,086	4,707	3,269	3,237
28	SULAWESI BARAT	2,460	360	339	325	306	142	181	132	62	139	117	179	178
29	NUSA TENGGARA BARAT	19,350	1,642	1,890	2,357	2,848	1,289	1,244	1,230	452	668	886	2,434	2,410
30	NUSA TENGGARA TIMUR	2,950	599	560	203	115	172	59	364	190	163	168	179	178
31	MALUKU	295	21	40	70	20	18	13	12	10	13	42	18	18
32	PAPUA	2,698	384	492	413	185	208	282	306	79	58	176	58	57
33	MALUKU UTARA	140	15.0	15	20.0	13.0	9.0	2.0	5.0	8.0	27.0	7.0	10	9.0
34	PAPUA BARAT	150	2	51	7	13	4	6	10	13	29	5	5	5
	JUMLAH PROPINSI	850,000	75,370	94,673	100,397	87,476	75,343	41,956	63,685	48,479	61,935	68,515	66,420	65,751

LAMPIRAN II.3
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	14,670	1,271	1,936	1,411	1,160	1,179	687	841	478	560	1,091	2,060	1,996
2	SUMATERA UTARA	50,090	1,516	5,025	6,448	5,495	5,013	2,004	4,810	3,345	3,984	4,633	3,971	3,846
3	SUMATERA BARAT	15,700	466	2,043	2,302	1,827	1,080	264	1,362	819	1,201	1,393	1,495	1,448
4	J A M B I	8,760	567	1,331	850	865	498	281	688	305	729	608	1,036	1,002
5	R I A U	12,620	657	1,587	1,901	1,352	1,261	340	921	731	790	1,036	1,038	1,006
6	BENGKULU	5,220	62	782	627	539	300	156	293	323	281	207	838	812
7	SUMATERA SELATAN	3,160	30	468	341	432	459	75	301	215	232	176	219	212
8	BANGKA BELITUNG	3,090	273	741	279	537	197	33	14	63	34	189	371	359
9	LAMPUNG	14,255	763	1,811	2,567	1,480	824	442	1,415	1,023	1,324	781	927	898
10	KEP. RIAU	15	-	-	-	1.0	2.0	-	4.0	-	1.0	-	4.0	3.0
11	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	BANTEN	1,250	45	104	193	122	125	80	116	38	67	70	147	143
13	JAWA BARAT	66,000	8,914	5,748	6,556	6,376	6,272	3,420	4,058	2,962	4,555	4,384	6,479	6,276
14	D.I. YOGYAKARTA	9,000	855	515	727	795	705	557	739	603	677	904	977	946
15	JAWA TENGAH	193,000	16,327	17,205	21,409	18,037	14,760	10,253	13,673	10,598	14,739	17,659	19,476	18,864
16	JAWA TIMUR	477,600	48,424	36,555	41,853	39,384	35,524	25,082	43,527	41,968	41,130	44,985	40,217	38,951
17	B A L I	3,750	585	213	155	266	201	183	258	378	715	174	316	306
18	KALIMANTAN BARAT	3,730	224	309	504	248	265	70	573	268	323	265	346	335
19	KALIMANTAN TENGAH	1,350	67	318	156	117	277	57	43	17	38	42	111	107
20	KALIMANTAN SELATAN	1,270	165	219	164	122	155	35	76	47	95	92	51	49
21	KALIMANTAN TIMUR	2,365	39	493	258	199	184	86	169	62	59	143	342	331
22	KALIMANTAN UTARA	65	-	5	11	-	6	-	3	-	4	3	17	16
23	SULAWESI UTARA	340	-	25	44	6	83	17	19	15	8	15	55	53
24	GORONTALO	730	-	46	51	118	67	46	39	1	7	115	122	118
25	SULAWESI TENGAH	7,340	517	1,061	734	676	807	396	923	504	601	217	459	445
26	SULAWESI TENGGARA	4,580	282	808	346	338	366	219	324	339	362	282	464	450
27	SULAWESI SELATAN	69,700	8,208	5,597	6,603	6,998	5,836	4,611	4,199	3,851	4,903	6,212	6,443	6,239
28	SULAWESI BARAT	9,380	1,071	961	961	987	790	650	481	210	370	931	1,000	968
29	NUSA TENGGARA BARAT	19,180	1,582	2,638	1,642	1,724	1,547	1,460	1,424	758	930	1,930	1,801	1,744
30	NUSA TENGGARA TIMUR	630	74	69	56	59	51	13	38	28	44	37	82	79
31	MALUKU	230	31	10	40	15	25	10	2	7	-	28	32	30
32	PAPUA	680	39	67	31	63	66	41	79	33	28	70	83	80
33	MALUKU UTARA	180	3	20	34	18	11	4	10	3	18	7	26	26
34	PAPUA BARAT	70	-	30	8	-	4	1	1	2	3	5	8	8
	JUMLAH PROPINSI	1,000,000	93,057	88,740	99,262	90,356	78,940	51,573	81,423	69,994	78,812	88,684	91,013	88,146

LAMPIRAN II.4
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	54,000	4,536	6,224	4,843	4,576	5,417	3,236	5,005	2,992	3,703	4,018	4,758	4,692
2	SUMATERA UTARA	143,540	3,542	13,298	16,984	15,614	10,728	9,668	11,167	12,245	12,241	10,912	13,666	13,475
3	SUMATERA BARAT	72,240	2,322	7,787	9,674	5,657	6,864	2,236	5,282	4,230	7,121	7,094	7,036	6,937
4	J A M B I	59,205	3,401	5,927	5,641	4,926	4,053	1,819	4,030	3,409	6,428	5,683	6,993	6,895
5	R I A U	53,460	2,428	6,803	8,847	7,116	6,927	2,515	4,858	3,527	3,265	2,333	2,438	2,403
6	BENGKULU	27,040	630	3,471	2,891	2,418	2,686	1,508	2,688	2,223	2,182	2,724	1,822	1,797
7	SUMATERA SELATAN	106,814	7,233	8,791	8,611	8,188	9,535	5,402	6,733	6,416	8,857	12,108	12,558	12,382
8	BANGKA BELITUNG	21,680	640	2,669	2,754	1,768	1,828	1,285	2,459	1,763	2,315	1,635	1,291	1,273
9	LAMPUNG	172,360	10,248	20,852	16,718	15,292	15,192	9,748	14,876	8,715	9,704	14,262	18,506	18,247
10	KEP. RIAU	150	-	-	-	20	13	-	82	-	15	10	5	5
11	DKI. JAKARTA	30	-	-	5	5	-	-	-	-	10	-	5	5
12	BANTEN	31,090	2,987	2,218	2,304	2,902	3,334	1,952	2,151	1,046	1,299	1,311	4,827	4,759
13	JAWA BARAT	302,294	29,575	20,192	22,945	30,317	30,089	17,727	20,047	16,677	17,597	15,510	41,097	40,521
14	D.I. YOGYAKARTA	26,080	1,917	1,850	2,130	2,350	1,950	1,204	1,517	1,645	2,348	2,795	3,209	3,165
15	JAWA TENGAH	417,740	22,690	33,129	44,134	36,918	28,995	19,226	27,502	24,054	32,853	35,329	56,853	56,057
16	JAWA TIMUR	633,530	44,111	44,412	58,806	53,329	44,518	29,552	51,455	50,472	53,380	52,624	75,967	74,904
17	B A L I	23,950	3,061	1,899	1,494	1,645	2,170	1,633	2,200	2,040	1,991	1,870	1,987	1,960
18	KALIMANTAN BARAT	95,377	5,143	9,850	8,985	5,576	9,316	8,588	8,851	5,644	6,842	7,817	9,449	9,316
19	KALIMANTAN TENGAH	35,553	3,869	3,258	2,512	3,036	2,220	2,383	3,104	2,315	1,966	3,204	3,870	3,816
20	KALIMANTAN SELATAN	45,685	5,136	4,198	4,840	6,431	3,820	2,340	2,284	1,575	2,214	3,580	4,666	4,601
21	KALIMANTAN TIMUR	35,680	3,722	3,765	3,915	3,117	3,004	2,478	3,040	1,738	1,295	2,283	3,687	3,636
22	KALIMANTAN UTARA	4,142	128	539	428	512	366	198	143	130	200	484	511	503
23	SULAWESI UTARA	13,230	514	1,183	1,510	1,061	1,479	905	871	870	1,019	845	1,497	1,476
24	GORONTALO	30,830	560	2,923	2,807	3,655	2,040	1,211	1,765	1,891	3,190	5,122	2,853	2,813
25	SULAWESI TENGAH	29,200	2,108	3,099	3,645	2,888	3,427	1,664	2,407	1,721	2,154	992	2,565	2,530
26	SULAWESI TENGGARA	19,870	1,580	2,340	1,011	2,357	1,717	740	1,946	1,553	1,616	1,513	1,761	1,736
27	SULAWESI SELATAN	145,900	10,051	9,608	12,033	14,442	16,266	11,887	11,546	7,698	7,133	10,039	17,723	17,474
28	SULAWESI BARAT	24,760	1,917	2,529	2,198	1,999	2,480	1,539	1,851	966	1,338	1,780	3,103	3,060
29	NUSA TENGGARA BARAT	54,850	6,983	5,312	3,481	4,163	3,826	3,610	3,871	2,590	3,671	5,142	6,144	6,057
30	NUSA TENGGARA TIMUR	18,120	3,002	2,896	1,558	768	849	690	1,324	1,203	839	990	2,015	1,986
31	MALUKU	2,820	160	98	335	229	277	230	269	319	420	69	208	206
32	PAPUA	8,940	763	1,283	1,126	814	770	419	706	385	389	733	781	771
33	MALUKU UTARA	1,990	132	176	263	314	130	67	91	100	202	224	147	144
34	PAPUA BARAT	1,850	15	265	169	58	84	203	238	189	110	72	225	222
	JUMLAH PROPINSI	2,714,000	185,104	232,844	259,597	244,461	226,370	147,863	206,359	172,341	199,907	215,107	314,223	309,824

LAMPIRAN II.5
PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 48/Permentan/SR.310/11/2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 47/PERMENTAN/SR.310/12/2017 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI TAHUN ANGGARAN 2018

ALOKASI PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2018

NO.	PROPINSI	SETAHUN	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES
1	ACEH	8,950	463	953	560	617	711	321	1,139	512	434	1,060	1,137	1,043
2	SUMATERA UTARA	19,700	388	1,622	1,259	1,803	1,997	1,437	1,781	1,937	2,073	2,272	1,633	1,498
3	SUMATERA BARAT	9,650	180	1,273	1,010	563	873	359	890	614	1,102	1,067	896	823
4	J A M B I	6,200	184	907	534	348	492	157	364	628	510	689	723	664
5	R I A U	6,375	289	577	641	449	807	190	759	601	641	737	357	327
6	BENGKULU	4,480	-	160	257	301	60	263	748	777	413	390	579	532
7	SUMATERA SELATAN	5,303	-	202	274	638	491	359	625	614	452	610	541	497
8	BANGKA BELITUNG	7,017	215	775	1,031	766	774	376	639	87	153	1,297	471	433
9	LAMPUNG	16,000	316	1,598	2,312	1,500	1,192	905	1,619	1,491	1,690	1,416	1,023	938
10	KEP. RIAU	75	-	-	-	9.0	4.0	-	32.0	-	7.0	13.0	5.0	5.0
11	DKI. JAKARTA	9	-	-	-	-	-	-	1	3	-	-	3	2
12	BANTEN	5,951	564	640	323	543	728	246	747	227	361	512	553	507
13	JAWA BARAT	51,141	3,904	3,155	4,066	3,588	6,443	4,182	4,012	3,057	2,837	3,954	6,228	5,715
14	D.I. YOGYAKARTA	2,967	121	185	192	276	357	311	520	154	230	87	278	256
15	JAWA TENGAH	170,222	11,618	15,688	17,479	15,666	13,059	8,577	13,669	10,115	13,903	16,428	17,741	16,279
16	JAWA TIMUR	361,881	27,769	29,596	36,855	31,024	25,630	15,787	31,818	27,726	29,656	36,701	36,148	33,171
17	B A L I	3,852	300	199	305	222	279	319	295	231	327	514	449	412
18	KALIMANTAN BARAT	8,000	224	453	985	833	639	348	893	655	870	581	792	727
19	KALIMANTAN TENGAH	2,500	10	179	629	349	258	76	73	122	49	97	343	315
20	KALIMANTAN SELATAN	4,200	310	449	560	382	585	213	285	274	357	277	265	243
21	KALIMANTAN TIMUR	1,800	34	272	149	184	114	112	226	88	144	255	116	106
22	KALIMANTAN UTARA	110	-	9	20	6	10	2	13	10	5	15	10	10
23	SULAWESI UTARA	750	8	138	64	50	107	50	19	91	22	56	76	69
24	GORONTALO	1,200	37	136	90	146	13	60	59	4	265	61	172	157
25	SULAWESI TENGAH	2,200	133	245	261	239	304	82	243	87	183	176	129	118
26	SULAWESI TENGGARA	4,500	503	321	568	486	184	185	405	363	295	357	434	399
27	SULAWESI SELATAN	17,500	1,252	1,524	2,318	1,373	872	797	1,627	1,611	1,474	1,475	1,657	1,520
28	SULAWESI BARAT	1,400	55	90	117	242	93	63	70	20	196	20	226	208
29	NUSA TENGGARA BARAT	7,500	981	730	682	943	481	330	619	365	548	643	614	564
30	NUSA TENGGARA TIMUR	1,690	96	149	210	235	105	136	312	65	80	67	123	112
31	MALUKU	660	30	126	73	40	60	10	67	69	56	52	40	37
32	PAPUA	1,997	26	288	94	190	149	95	283	44	86	204	281	257
33	MALUKU UTARA	60	8	1	4	3	8	-	-	2	-	17	9	8
34	PAPUA BARAT	160	1	33	-	8	4	-	13	17	57	1	14	12
	JUMLAH PROPINSI	736,000	50,019	62,673	73,922	64,022	57,883	36,348	64,865	52,661	59,476	72,101	74,066	67,964